

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SEMESTER II TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester II Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester II Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada periode semester II anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester I Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTSP KABUPATEN SUMEDANG



ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19670918 198703 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis.....	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 Perencanaan Strategis.....	4
2.2 Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Capaian Kinerja.....	11
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	26
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Perbaikan Kedepan.....	37
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *goodgovernance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

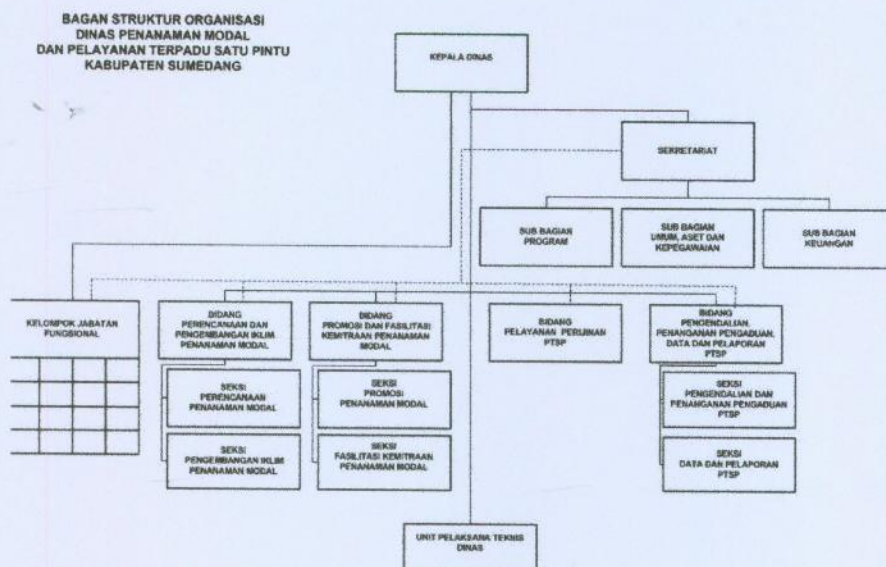
Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Tugas pokok dan fungsi uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan struktur organisasi sebagai berikut :



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu Strategis dalam pelaksanaan peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan RTRW dan RDTR Kabupaten Sumedang serta dokumen perencanaan teknis lainnya terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri baru dan kawasan ekonomi khusus
2. Reformasi pelayanan perizinan terkait dengan Kesiapan Implementasi Terbitnya Pp 24 Tahun 2018 Terkait Online Single Submission (OSS) dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Yang Pasti, Cepat Dan Mudah.
3. Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang yang mempunyai fungsi meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan Penanaman Modal. Majunya suatu daerah tidak bisa lepas dari peran penanaman modal, penanaman modal menjadi hal yang sangat penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Adanya investasi akan mendatangkan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang hadir sebagai mitra investor dalam memperoleh perizinan dengan kepastian waktu dan biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Misi ke-3 (tiga) yakni Misi "**Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal**". Dan Ke-4 (empat) yakni Misi "**Menata Birokrasi pemerintah yang**

responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat". Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah nilai investasi di Sumedang
Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan
2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan	Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
		Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
2.	Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan	Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
		Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2020, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah
		Program Peningkatan Promosi Dan Kemitraan Penanaman Modal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
		Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal Dan PTSP

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.606.158.840.000,-	Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	87,23	Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan
Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	A	Nalai Sakip Perangkat Daerah
	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	97	Jumlah Pagu dibagi jumlah penyerapan dikali seratur
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	1	Jumlah Inovasi Perangkat daerah
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Poin	70	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2021	Target Akhir Renstra 2023
1.	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.106.170.000.000,-	1.606.158.840.000,-	2.505.607.790.400,-
2.	Indeks	Poin	84,11	87,23	90,00

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2021	Target AkhirRenstra 2023
	Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan				
3.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	B	A	A
4.	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	Persen	97	97	97
5.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Buah	1	1	1
6.	Indeks Pembangunan Zona Integritas/R eformasi Birokrasi	Poin	-	70	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 sebesar **100.025 %**. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.606.158.840.000,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	87,23

3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Ninas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Jumlah Nilai Investasi di Sumedang

Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah RI. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Data realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor secara berkala. Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi investor yang tengah menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha mengalami surplus atau defisit laporan keuangan. Di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, setiap pelaku usaha dengan modal yang ditanamkan di Indonesia, diwajibkan menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

a. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja

Target Kinerja Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.606.158.840.000,- berdasarkan data LKPM sampai dengan Semester II Realisasi investasi Kabupaten Sumedang Sebesar Rp 4.249.320.950.689,- atau sebesar (264,56%) (KINERJA SANGAT TINGGI). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.3
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Jumlah Nilai Investasi di Sumedang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.606.158.840.000,-	4.249.320.950.689,-	264,56	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi dan capaian realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2021 mengalami peningkatan sangat signifikan. Realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebesar Rp 1.180.357.950.064,51 atau terealisasi sebesar 88,19 % sedangkan realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sampai dengan Semester II terealisasi sebesar RP 4.249.320.950.689,- atau terealisasi sebesar 264,56%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah nilai investasi di Sumedang
Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	1.338.465.700.000,-	1.180.357.950.064,51	88.19	1.606.158.840.000,-	4.249.320.950.689,-	264,56	Realisasi dan capaian

dalam penyelen ggaraan PTSP									kin erja me nin gka t
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam Renstra Tahun 2018-2023, target jangka menengah nilai investasi Sumedang adalah sebesar Rp 2.505.607.790.400,- dan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.249.320.950.689,- atau sebesar 169,59%

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2021
Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	2.505.607.790.400,-	4.249.320.950.689,-	169,59

d. Perbandingan realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Total realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Januari - Desember Tahun 2020 yang direalisasikan oleh para investor di Kabupaten Sumedang mencapai Rp 1.180.357.950.064,51. Dibandingkan dengan Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 1.229.442.500.000,- Mengalami penurunan sebesar -3,99 %. Kemudian Tahun 2021 sampai Semester II untuk sementara mengalami peningkatan sebesar 360 % karena baru terealisasi sebesar Rp 4.249.320.950.689,-

Pandemi Covid-19 mempengaruhi realisasi investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) baik tingkat nasional, provinsi Jawa Barat termasuk juga Kabupaten

Sumedang, realisasi investasi mengalami penurunan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi akibat Pandemi Covid-9 membawa dampak terhadap peningkatan realisasi investasi Kabupaten Sumedang pada Tahun 2021.

Perkembangan realisasi Kabupaten Sumedang Tahun 2019 sampai dengan Semester II Tahun 2021 jauh diatas rata-rata Jawa Barat dan Nasional. Tingkat nasional mengalami peningkatan sebesar 23,23%, Provinsi Jawa Barat sebesar 0,45% dan Sumedang mengalami rata-rata peningkatan sebesar 128,01%.

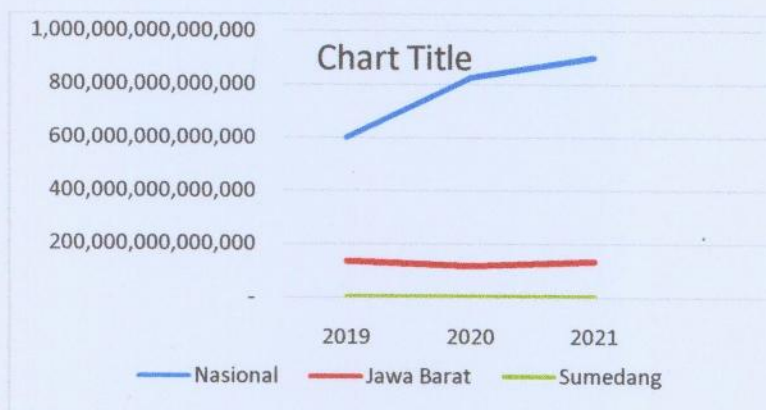
Realisasi investasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Rp 137.069.000.000.000,- Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 120.429.949.751.020,- dan sampai dengan Semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 136.126.809.043.668,- Berdasarkan data realisasi tersebut, dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 15.696.859.292.648,- atau meningkat sebesar 13,03%.

Pada tingkat nasional, realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp 601.300.000.000.000,- Realisasi investasi Tahun 2020 sebesar Rp 826.300.000.000.000,- dan Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 901.000.000.000.000,-. Berdasarkan data realisasi tersebut pada tingkat nasional realisasi investasi tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 74.700.000.000.000,- Atau sebesar 9,04%, dari tahun 2020.

Perbandingan realisasi investasi tahun 2019 sampai dengan Semester II Tahun 2021 pada tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1

Perbandingan Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.



e. **Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Target kinerja Indikator Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2021 sebesar Rp 1.606.158.840.000,- dan realisasi sampai dengan semester II adalah Rp 4.249.320.950.689,- atau capaian kinerja sebesar 264,56%. Realisasi investasi tersebut bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM RI yang disampaikan perusahaan/investor untuk setiap aktivitas investasi yang dilakukan dalam kurun waktu Semester II Tahun 2021. Target kinerja tercapai. Capaian realisasi investasi Tahun 2021 sebagian besar bersumber dari realisasi investasi proyek strategis nasional pembangunan Jalan Tol CISUMDAWU oleh Citra Karya Jabar Tol sebesar Rp 3.925.125.100.000,- atau sebesar (92,37%) dan pembangunan transmisi tenaga listrik oleh Perusahaan listrik negara (Persero) sebesar Rp 150.257.900.000,- atau sebesar (3,54%). Dan sebesar Rp 173.937.950.689,08 atau sebesar (4,09%) dari investasi perusahaan-perusahaan lainnya di Kabupaten Sumedang.

Untuk mencapai indikator kinerja jumlah investasi di Kabupaten Sumedang didukung oleh dua program, yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Investor. Capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 persentase jumlah investor di Kabupaten Sumedang ditargetkan meningkat sebesar 40% dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II Tahun 2021, capaian kinerja peningkatan jumlah investor terealisasi sebesar 85,29% atau terealisasi 213,24%. Capaian tersebut diperoleh dari peningkatan kegiatan investasi yang ditanamkan oleh para investor pada Tahun 2021 sebanyak 63 investor/proyek, dan tahun 2020 sebanyak 34 investor/proyek.

Dan selanjutnya adalah Program Promosi Penanaman Modal dengan Indikator Persentase Peningkatan Minat Investor di Sumedang. Untuk mengukur capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah realisasi minat investasi pada tahun berjalan, minat investasi dimaksud datanya berasal dari jumlah realisasi data izin investasi. Berdasarkan data

monitoring evaluasi capaian kinerja, realisasi Persentase Peningkatan Minat Investor di Sumedang sampai dengan triwulan II Tahun 2021 dari target sebesar 5% terealisasi sebesar 16,8% atau sebesar 336%. Data realisasi tersebut diperoleh dari data realisasi izin investasi tahun 2021 sebanyak 4.644 dan tahun 2020 sebanyak 3.977 izin.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung Capaian kinerja jumlah investasi sumedang Tahun 2021 sebesar Rp 350.000.000,00 terdiri dari program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp 150.000.000,00 dan Program Promosi Penanaman Modal Sebesar Rp 200.000.000,00 sampai dengan Semester II Tahun 2021 terrealisasi sebesar Rp 341.838.500,- atau sebesar 97,58%.

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja JUmlah Realisasi Investasi di Sumedang Semester II Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	150.000.000,-	145.490.000,-	96,99
Program Promosi Penanaman Modal	200.000.000,-	196.348.500,-	98,17
Jumlah Total	350.000.000,-	341.838.500,-	97,58

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Jumlah Investasi di Sumedang sampai dengan Semester II Tahun 2021 mencapai 166,98 dan hasilnya efisien.

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Jumlah Investasi di Sumedang sampai dengan Semester II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (3) - (4)$	(6)

Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Investasi di Sumedang	Nilai di	264,56	97,58	166,98	Efisien
--	------------------------------	----------	--------	-------	--------	---------

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Penunjang capaian kinerja jumlah nilai investyasi di Sumedang, yaitu :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

(Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berupa penyusunan perubahan Perbup pemberian insentif penanaman modal, Keppub tentang tim penilai pemberian insentif dan kemudahan PM dan SOP pemberian insentif dan kemudahan PM, Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten Kota berupa evaluasi RUPM dan penyusunan data potensi investasi khususnya Kawasan Industri BUTOM)

Indikator kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu Persentase peningkatan Jumlah Investor. Dengan target tahun 2021 sebesar 40% dan sampai dengan triwulan I Tahun 2021 terealisasi sebesar 85,29% atau sebesar 213,24%. target tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya data peta potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah.
- Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis.
- Implementasi kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai upaya peningkatan daya Tarik investasi daerah

Solusi/rekomendasinya adalah :

- Dilakukan penyusunan data potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah dengan berkoordinasi dengan Bappppeda dan SKPD Teknis.

- Penyusunan studi kelayakan potensi investasi unggulan daerah
- Melaksanakan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Sumedang

2) Program Promosi Penanaman Modal

(Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota berupa kegiatan Pameran potensi investasi pada even APKASI Expo 2021 dan promosi potensi investasi melalui berbagai media elektronik dan media sosial)

Indikator kinerja program promosi penanaman modal yaitu persentase peningkatan minat investasi di Kabupaten Sumedang. Target kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 5%. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan Semester II tahun 2021 terealisasi sebesar 16,8 % atau sebesar 336%. target tercapai.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
- Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi

Solusi/rekomendasi yaitu :

- Koordinasi dengan SKPD teknis dan bidang Perencanaan dan Pengembanagan Iklim Penanaman Modal untuk memperoleh data peluang penanaman modal
- Penyusunan dokumen strategi promosi investasi di Kabupaten Sumedang.

2) Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survey dilakukan oleh DPMPSTSP Kabupaten Sumedang sebagai Lembaga penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survey dilakukan secara tetap dengan jangka waktu tertentu, survey dilakukan setiap 1 bulanan. Teknik survey kepuasan masyarakat dilaksanakan secara elektronik (*e-survei*) melalui aplikasi pengelolaan perizinan SI ICE MANDIRI.

a. *Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja*

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sebesar 87,23 poin dan realisasinya berdasarkan hasil survey Selama Semester II Tahun 2021 sebesar 86,09 poin atau sebesar 98,69%. Target Kinerja belum tercapai.

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	poin	87,23	86,09	98,69	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 sebesar 86,09 poin atau terealisasi sebesar 98,69% dibandingkan target 87,23 poin, dibandingkan Tahun 2020 terealisasi sebesar 85,86 poin atau sebesar 99,55% dari target sebesar 86,25 poin.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II
Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	poin	86,25	85,86	99,55 %	87,23	86,09	98,69 %	Realisasi dan Capaian Kinerja Menu run

n									
PTS									
P									

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Dalam RENSTRA Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, target jangka menengah Indeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan adalah sebesar 90,00 point dan realisasi Semester II Tahun 2021 sebesar 86,09 poin, dengan demikian dibandingkan dengan capaian kinerja jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat adalah terealisasi sebesar 95,66%

Tabel 3.10
Perbandingan Reralisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2021
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	90,00	86,09	95,66%

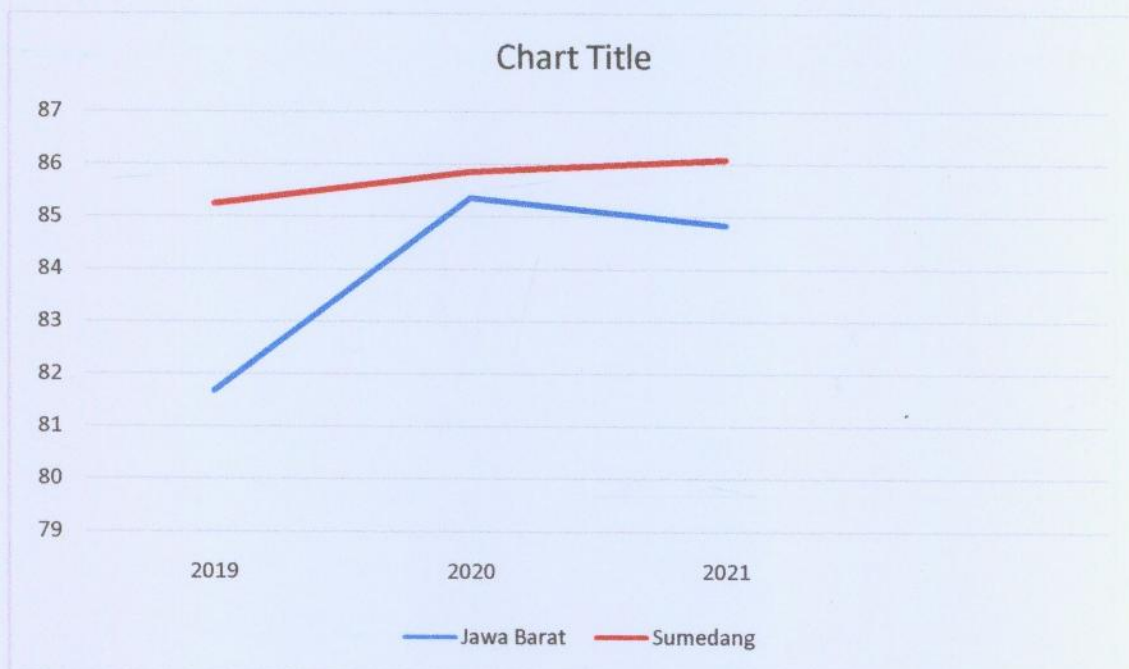
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi

Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 capaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 85,25 poin, Tahun 2020 terealisasi sebesar 85,86 poin dan Semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar 86,09 point mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,42 poin.

Sedangkan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 81,68%, Tahun 2020 sebesar 85,36%. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 terealisasi sebesar 85,84% dengan peringkat Mutu Pelayanan "B" atau kategori Kinerja Pelayanan "BAIK", Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Dalam

lima tahun terakhir nilai IKM DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat secara konsisten mengalami peningkatan.

Grafik 3.2
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sumedang dengan Provinsi Jawa Barat.



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II tahun 2021 sebesar 87,23 dan realisasinya 86.09 atau capaian kinerja sebesar 98,69%. Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sumedang terlihat dari hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena belum seluruh lapisan masyarakat mengetahui kebijakan kemudahan pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan online. Solusi/rekomendasinya adalah :

1. Menyusun atau mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dalam rangka meningkatkan mutu layanan lebih cepat dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai upaya memberi peran yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kebijakan dalam peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumedang terdiri dari tiga program yaitu :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal (Penyediaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu datu pintu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan)

Capaian kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal dilihat dari selisih jumlah permohonan izin yang disampaikan dan jumlah izin yang diterbitkan. Berdasarkan pengukuran hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan Semester II Tahun 2021 dari target capaian sebesar 80% jumlah permohonan yang terfasilitasi terealisasi sebesar 76,06% atau terealisasi sebesar 95,08% dari target. Data tersebut diperoleh dari jumlah permohonan yang disampaikan selama tahun 2021 sebanyak 6.106 permohonan dan jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.644 izin dan terdapat 1.462 permohonan yang ditolak/dikembalikan.

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal)

Capaian kinerja program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilihat dari jumlah investor yang menyampaikan Laporan kegiatan investasi melalui Aplikasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3. Program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal (Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp 722.462.000,- samapai dengan Semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 109.763.900,- atau sebesar 15,19%

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Pelayanan Penanaman Modal	200.000.000,-	199.847.010	99,92
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	446.289.000,-	293.603.300	65,79
3. Program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal	76.173.000,-	75.570.000	99,21
Jumlah Total	722.462.000,-	569.020.310,-	88,31

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021 tidak dapat dihitung karena capaian kinerja kurang dari 100%.

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks
Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	98,69 %	88,31%	10,38%	Efisien

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Survey kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang dilaksanakan melalui 9 unsur pelayanan yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan unsur sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat sampai dengan semester II Tahun 2021 kepada 264 pengguna layanan sebagai responden diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 3.13
Hasil survey Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2021

No.	UNSUR LAYANAN	NILAI RAT-RATA
1	Persyaratan	3,428
2	Prosedur	3,443
3	Waktu Pelayanan	3,333
4	Biaya/tarif	3,697
5	Produk layanan	3,432
6	Kompetensi Pelaksana	3,424
7	Perilaku Pelaksana	3,447
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,701
9	Sarana dan Prasarana	3,402
	Nilai Unit Pelayanan	86,09 (Baik)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan survey terhadap 9 unsur pelayanan, secara umum rata-rata nilai per unsur menunjukkan nilai yang baik. Unsur yang memperoleh penilaian tertinggi yaitu Penanganan pengaduan, saran dan pengaduan dengan nilai rata-rata sebesar 3,701. Sedangkan unsur yang nilai rata-rata paling rendah yaitu waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 3,333. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlu dilakukan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun atau mengevaluasi Standar Pelayanan dalam rangka meningkatkan mutu layanan secara jelas, terbuka dan mudah diakses serta penyesuaian dengan regulasi terbaru.

2. Menambahkan Profil/Identitas Responden, dengan mencantumkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan Utama untuk keperluan kualitas pengujian data.

Program penunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Yaitu :

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal (Penyediaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu datu pintu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan)

Indikator kinerja program pelayanan penanaman modal yaitu persentase permohonan penanaman modal yang terfasilitasi, target kinerja tahun 2021 sebesar 80 %, berdasarkan data monitoring dan evaluasi sampai dengan semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar 76,06% atau sebesar 95,08%. Target tidak Tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Dengan adanya pemberlakuan UU Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah turunannyaterdapat peralihan aplikasi pelayanan perizinan dari Aplikasi SI ICE MANDIRI ke OSS RBA, khususnya untuk IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menuntut adanya penyesuaian Peraturan Daerah.
- Belum seluruh lapisan masyarakat mengetahui kebijakan kemudahan pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan online.

Solusi yang akan dilaksanakan adalah :

- Penyusunan Peraturan Daerah pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung.
- Pemberian layanan jemput bola ke tempat-tempat pelayanan dan keramaian masyarakat dan Peningkatan publikasi layanan melalui media sosial dan website

- 2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal)

Indikator kinerja program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP, target kinerja Tahun 2021 sebesar 70%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan Semester. II Tahun 2021 tersealisasi sebesar 61,58% atau sebesar 87,97%. Target tidak Tercapai. Data tersebut diperoleh dari data investor yang wajib LKPM adalah sebanyak 570 perusahaan dan selama Tahun 2021 yang menyampaikan LKPM sebanyak 351 investor/proyek. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya database jumlah investor Sumedang yang wajib LKPM
 - Belum seluruh investor mengetahui kebijakan mengenai kewajiban menyampaikan LKPM
 - Kemampuan Investor untuk melaporkan LKPM sangat terbatas
- Solusi atas kendala tersebut yaitu :
- Penyusunan Database investor Kabupaten Sumedang yang wajib LKPM
 - Sosialisasi melalui berbagai media mengenai kebijakan LKPM
 - Pelatihan mengenai Aplikasi LKPM kepada Investor

- 3) Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal (Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)

Indikator Kinerja program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal yaitu Persentase data Penanaman Modal dan Perizinan yang Valid, dengan target kinerja tahun 2021 adalah sebesar 100%. Berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan Semester II Tahun 2021 terealisasi sebesar 100% atau sebesar 100%. Target tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum ada analisis data mengenai capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang.

Solusi yang akan dilaksanakan yaitu :

- Penyusunan analisis data capaian Penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang yang dapat menggambarkan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan, permasalahan dan rekomendasi.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Semester II Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 92,29%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Semester II Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatn		PROGRAM	9.333.29	6.502.374.3	69,67	28.309.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Peningkatan kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	0.727	40		16.387
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	97.117.800	91.317.800	94,03	5.800.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.433.500	24.633.500	80,94	5.800.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.627.900	6.627.900	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.709.900	8.709.900	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.526.900	4.526.900	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.550.900	4.550.900	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.268.700	42.268.700	100	-
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.014.766.977	5.428.617.622	90,25	586.149.355
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Peralatan Kantor	5.954.782.327	5.368.639.422	90,17	586.142.905

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	17.983.050	17.983.050	100	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	42001.600	41.995.150	99,98	6.450
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.000.000	15.000.000	100	-
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000	100	-
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	481.713.450	476.742.550	98,97	4.970.900
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.532.650	218.184.055	98,49	3.348.595
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.160.000	83.040.000	99,86	120.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	970.000.000	96.678.846	99,67	321.154
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.0032.800	28.887.800	96,19	1.145.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.988.000	49.951.849	99,93	36.151
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	420.270.000	4143.99.800	98,60	5.870.200

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		DAERAH				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	420.270.000	414.399.800	98,60	5.870.200
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.835.362.500	1.800.345.031	98,09	35.017.469
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	220.100.000	197.093.931	89,55	23.006.069
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.290.000	40.738.400	98,66	551.600
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.573.972.500	1.562.512.700	99,27	11.459.800
		KEGIATAN PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	469.060.000	466.192.100	99,39	2.867.900
		Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.540.000	149.815.100	98,86	1.724.900
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.960.000	9.5913.000	99,95	47.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.560.000	220.464.000	99,51	1.096.000
	Jumlah Nilai Investa	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	150.000.000	1454.900.000	96,99	4.510.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	si di Sumedang	PENANAMAN MODAL				
		KEGIATAN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	75.000.000	71.000.000	94,67	4.000.000
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.000.000	71.000.000	94,67	4.000.000
		KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA	75.000.000	74.490.000	99,32	510.000
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten Kota	75.000.000	74.490.000	99,32	510.000
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	200.000.000	196.348.500	98,17	3.651.500
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	200.000.000	196.348.500	98,17	3.651.500
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	200.000.000	196.348.500	98,17	3.651.500
	Indeks Kepuas	PROGRAM PELAYANAN	200.000.00	199.847.010	99,92	152.990

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	an Masyarakat Bidang Perizinan	PENANAMAN MODAL	0			
		KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000	199.847.010	99,92	152.990
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	170.000.000	169.847.040	99,91	152.960
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000	29.999.970	99,99	30
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	446.289.000	29.360.330	65,79	152.685.700
		KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	446.289.000	293.603.300	65,79	152.685.700

Sasaran Strategis	Indikator or Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	84.710.000	40.964.600	48,36	43.745.400
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	235.712.000	169.977.000	72,11	65.735.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal	125.867.000	82.661.700	65,67	43.205.300
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	76.173.000	75.570.000	99,21	603.000
		KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	76.173.000	75.570.000	99,21	603.000
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	76.173.000	75.570.000	99,21	603.000
JUMLAH TOTAL			10.405.752.727	9.603.473.713	92,29	802.279.014

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran sebesar 90,78%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2020)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.974.793.086	1.936.919.233	98.08	37.873.853	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	295.614.550	276.867.760	93.66	18.746.790	
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.339.254.220	1.320.523.463	98.60	18.730.757	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.400.000	12.400.000	100	-	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	150.699.316	150.686.510	99.99	12.806	
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	41.700.000	41.316.500	99.08	12.806	
		Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	60.000.000	60.000.000	100	0	
		Penyediaan Jasa Kebersihan	55.125.000	55.125.000	100	0	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.538.833.480	1.533.098.605	99.63	5.734.875
		Pengadaan Perlengkapan	951.674.630	948.733.755	99.69	2.940.875	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		dan Peralatan Kantor				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	346.668.000	346.118.000	99.84	550.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	196.490.850	194.246.850	98.86	2.244.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	44.000.000	44.000.000	100	0
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	306.900.900	301.920.623	98,38	4.980.277,00
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	5.250.000	5.250.000	100	0
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	110.935.714	102.870.714	92.73	8.065.000
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	94.809.764	56.809.765	87.66	8.000.000
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	46.125.950	46.060.950	99.86	65.000
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran	40.615.870	40.615.870	100	0

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		n SKPD				
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	40.615.870	40.615.870	100	0
		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	26.648.300	17.648.300	66.32	9.000.000
		Pengelolaan Data Kepegawaian	26.648.300	17.648.300	66.32	9.000.000
	Nilai Investasi di Sumedang	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah	642.185.265	17.648.300	66.23	452.902.715
		Fasilitasi Pemberian Insentif Penanaman Modal	56.008.140	29.433.100	52.55	26.575.040
		Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Penanaman Modal	147.960.150	146.610.150	99.09	1.350.000
		Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang	438.216.975	13.239.300	3.02	424.977.675
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	717.164.000	687.492.400	97,35	29.671.600,00
		Peningkatan Pelayanan Perizinan	236.782.500	236.114.000	99.72	668.500
		Pemutakhiran Data Perizinan	56.569.125	56.554.350	99.97	14.775
		Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik	48.200.000	47.500.000	98.55	700.000
		Pengembang	466.730.0	460.985.	98.7	5.744.52

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		an Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik	25	500	7	5
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KEMITRAAN PENANAMAN MODAL	565.296.055	547.704.600	98.77	17.591.455.50
		Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal Dan Perizinan	273.308.200	268.898.950	98.39	4.409.250
		Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal	170.384.205	159.037.000	93.34	11.347.205.50
		Penyusunan Elektronik Promotion And Investment System (Epis)	121.603.650	119.768.650	98.49	1.835.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DAN PTSP	172.274.364.30	167.672.450	97.33	4.601.914.30
		Pengelolaan Data Dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Dan Ptsp	53.823.200	49.323.200	91.64	4.500.000
		Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.451.164	118.349.250	99.91	101.914.30
		JUMLAH TOTAL	5.885.113.784	5.342.216.172	90.78	542.897.612.80

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Semester II Tahun 2021 rata-rata sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang sebesar 264,56 %.
- 2) Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan sebesar 98,69 %.
- 3) Capaian kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah belum ada nilai
- 4) Capaian kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sebesar 92,29%.
- 5) Capaian kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah sebesar 300%
- 6) Capaian kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi belum ada nilai


4.2 Perbaikan Kedepan


Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja sampai dengan Semester II tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu peningkatan peran Pemerintah Daerah (sebagai Fasilitator) dalam mendukung pengembangan iklim investasi dan pelayanan perizinan terutama dalam hal peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada investor melalui kolaborasi dan inovasi;
- 2) Perlu terus dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sektor UMKM dalam pengembangan investasi dan pelayanan perizinan;
- 3) Perlu peningkatan kepatuhan investor/masyarakat terhadap kebijakan penanaman modal dan perizinan terutama dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semester II Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 31 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP KABUPATEN SUMEDANG, 


ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19670918 198703 1 003